

ABSTRAK

Keberadaan BUMN di Indonesia merupakan salah satu wujud penerapan Pasal 33 UUD 1945. Pembentukan *holding* BUMN Pertambangan di Indonesia menempatkan PT Inalum (persero) tbk sebagai induk perusahaan dan PT Timah tbk, PT Tambang Bukit Asam tbk serta PT Aneka Tambang (tbk) sebagai anak perusahaan. Pembentukan Holding BUMN Pertambangan ini dilatar belakangi oleh 3 (tiga) hal, yaitu pertama upaya peningkatan nilai perusahaan BUMN sektor tambang yang masih lemah. Kedua, menciptakan proses hilirisasi yang untuk meningkatkan efektifitas manajemen dan permodalan perusahaan. Ketiga, yaitu sebagai sarana untuk pengambilalihan 51 persen saham PT Freeport Indonesia.. Namun, Pembentukan *holding* BUMN Pertambangan masih menimbulkan beberapa kekhawatiran yaitu hilangnya hak kontrol pemerintah atas ketiga anak perusahaan *holding* BUMN Pertambangan yang dianggap merupakan merupakan upaya privatisasi dan ketidakjelasan status anak perusahaan BUMN. Hal itu karena berkaitan dengan kepemilikan saham seri A Dwiwarna oleh negara yang terdapat di induk dan anak perusahaan BUMN.

Kata Kunci : Holding BUMN, Saham Seri A Dwiwarna, Privatisasi